

ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) KEUANGAN PADA PEMERINTAHAN KOTA PARIAMAN

NOVIA CITRA DEWI

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
E-mail: noviacitradewi218@gmail.com

SELIA MARISKA

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sumatera Barat
E-mail: seliaademariska@gmail.com

Abstract

This study aims to obtain an overview of the implementation of financial SIMDA at the Head Office of Pariaman Tengah, East Pariaman Sub-District Office, Office of South Pariaman Subdistrict and Office of North Pariaman Sub-District. And know the understanding of employees in implementing SIMDA Finance and obstacles encountered in its application. Respondents in the study were four persons consisting of accounting and reporting staff. Data were collected through direct interview with respondents. The results of interviews and data that have been collected are analyzed by descriptive method using phenomenology approach. The results of the study indicate that in general employees have understood the meaning of financial SIMDA as well as description of its implementation related to input and output data. Constraints faced in the implementation of this SIMDA Finance applications SIMDA is rapidly expired, frequent offline network, there is no documentation about the flow chart summary that shows cash flow data, weak data management system, procedures to see the data incidental still too long, space is still inadequate offices as well as the occurrence of human error.

Keywords: Accounting, Application, Finance, Process and Constraints

PENDAHULUAN

Dengan adanya sistem tata pemerintah yang baik atau *good governance*, pemerintahan perlu untuk mengembangkan teknologi informasi agar pemerintah dapat dengan mudah untuk mengakses, mengelola dan mendayagunakan informasi secara tepat, cepat dan akurat. Maka pemerintah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan, dan menyalurkan informasi keuangan kepada

pelayanan publik baik itu untuk pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah.

Dalam kerangka ini, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengamanatkan adanya dukungan sistem informasi keuangan daerah untuk menunjang perumusan kebijakan fiskal secara nasional serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan desentralisasi. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah daerah diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2001 tentang informasi keuangan daerah. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi direalisasikan dalam bentuk sistem informasi terkomputerisasi yang disebut Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan. SIMDA Keuangan dirancang oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang merupakan suatu sistem informasi yang dibangun, dikembangkan dan digunakan untuk melakukan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berbasis kinerja.

BPKP sesuai dengan fungsinya sebagai internal auditor dan sebagai pengemban amanat Pembina penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai PP Nomor 60 tahun 2008 mengembangkan Program Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menyediakan *data base* mengenai kondisi di daerah yang terpadu baik dari aspek keuangan, aset daerah, kepegawaian/aparatur daerah maupun pelayanan publik yang dapat digunakan untuk penilaian kinerja instansi pemerintah daerah.
2. Menghasilkan informasi yang komprehensif, tepat dan akurat kepada manajemen pemerintah daerah. Informasi ini dapat digunakan sebagai bahan untuk mengambil keputusan.
3. Mempersiapkan aparat daerah untuk

mencapai penguasaan dan pendayagunaan teknologi informasi yang lebih baik.

4. Memperkuat basis pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.

Sejak diterapkannya Aplikasi SIMDA Keuangan, Aplikasi SIMDA Keuangan mengalami tiga tahap perubahan yaitu:

1) SIMDA Ver. 1.0

Aplikasi SIMDA Ver. 1.0 ini merupakan sistem pengelolaan keuangan yang pertama kali dikembangkan oleh BPKP, yaitu pada tahun 2003. Aplikasi ini dikembangkan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 mengenai pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran dan belanja daerah, dan draft sistem akuntansi pemerintah yang sedang tahap pengembangan saat itu. Sistem ini dipakai sampai dengan tahun 2004 dan berhasil Aplikasi SIMDA Ver. 1.0 ini merupakan sistem pengelolaan keuangan yang pertama kali dikembangkan oleh BPKP, yaitu pada tahun 2003.

2) SIMDA Ver. 2.0

Aplikasi SIMDA Ver. 2.0 merupakan penyempurnaan dari versi sebelumnya akibat adanya perubahan dan penambahan acuan peraturan yang mendasarinya, yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No.

29 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah, dan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah. Sistem ini mulai mengaplikasikan sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang. Sistem ini berhasil diimplementasikan di 28 pemerintahan daerah.

3) SIMDA Ver. 2.1

SIMDA Ver. 2.1 sendiri merupakan sistem informasi versi paling *update* yang telah berhasil dikembangkan oleh BPKP akibat adanya perubahan acuan peraturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 mengenai Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sistem ini mulai mulai diaplikasikan sejak tahun 2006 dan sampai sekarang masih digunakan dengan beberapa penyempurnaan, misalnya dengan adanya perubahan ketentuan pedoman pengelolaan keuangan daerah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 59 Tahun 2007 mengenai Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006.

Sejauh ini dampak dari perubahan aplikasi SIMDA Keuangan yaitu pegawai yang instansi/kantornya sudah menerapkan Aplikasi SIMDA

Keuangan harus menyesuaikan diri kembali terhadap perubahan aplikasi tersebut. Hal ini yang membuat pegawai lebih memilih untuk membuat laporan keuangan secara manual karna belum terbiasa menggunakan aplikasi tersebut. Program aplikasi ini digunakan untuk pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, terdiri dari penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporannya. Aplikasi ini biasa digunakan oleh Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran serta pegawai yang berhubungan dengan pelaporan keuangan. Adapun output yang dihasilkan aplikasi ini antara lain:

1) Penganggaran

Rencana Kerja Anggaran (RKA), Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Rancangan Penjabaran APBD, APBD dan Penjabaran APBD beserta perubahannya, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

2) Penatausahaan

Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Tanda Setoran (STS), beserta register-register, dan formulir-formulir pengendalian anggaran lainnya.

3) Akuntansi dan Pelaporan

Jurnal, Buku Besar, Buku Pembantu, Laporan Keuangan (Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Neraca), Perda Pertanggungjawaban

dan Penjabarannya.

Dari beberapa pemerintahan yang menerapkan SIMDA Keuangan, salah satunya adalah Pemerintah Kota Pariaman. Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan di Kota Pariaman diterapkan sejak tahun 2006 tetapi SIMDA hanya untuk pelaporan anggaran saja. Pada tahun 2007 SIMDA Keuangan baru digunakan untuk seluruh pelaporan keuangan. Akan tetapi SIMDA Keuangan belum menggunakan sistem *online*, SIMDA Keuangan secara *online* baru diterapkan pada tahun 2017 sampai sekarang. Pengguna Aplikasi SIMDA Keuangan yaitu seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Pemerintah Kota Pariaman, termasuk Kecamatan yang ada di Pemerintah Kota Pariaman yang juga menggunakan Aplikasi SIMDA Keuangan untuk melaporkan realisasi keuangannya. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pemahaman pegawai Pemerintahan Kota Pariaman tentang SIMDA Keuangan?, 2) Apa saja kendala yang dihadapi dalam menerapkan SIMDA Keuangan di Pemerintahan Kota Pariaman?

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.58 tahun 2005, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban,

dan pengawasan keuangan daerah. Berdasarkan PP tersebut pengelolaan harus berdasarkan asas umum pengelolaan keuangan daerah antara lain:

1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
2. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Menurut Wahab (2008) dalam pengertian yang luas implementasi kebijakan merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi kebijakan adalah "suatu proses dinamika yang mana meliputi interaksi banyak faktor (Grizzle dan Pettijohn, 2002). Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi SIMDA Keuangan mengacu pada teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III. Menurut Subarsono (2005) "implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 variabel yaitu komunikasi (*Communications*),

Sumber daya (*resource*), Sikap (*disposition*) dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*)". Keempat variabel tersebut dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat.

METODE PENELITIAN

Objek penelitian adalah dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan Aplikasi SIMDA Keuangan peneliti memilih 4 (empat) Kecamatan yang ada di Kota Pariaman yaitu Kantor Camat Pariaman Tengah, Kantor Camat Pariaman Utara, Kantor Camat Pariaman Timur dan Kantor Camat Pariaman Selatan sebagai objek penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian dengan menggunakan metode fenomenologi akan menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu.

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah: a) Data primer, yaitu data yang diperoleh dengan melakukan wawancara langsung kepada informan kunci yaitu Kasubag Keuangan Kantor Camat. B) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembahasan, literatur, serta sumber lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data adalah: a) Wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi). Analisis data merupakan langkah terakhir dalam penelitian sebelum melakukan penarikan kesimpulan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi, berguna untuk mendeskripsikan pemahaman yang mendalam dari penerapan SIMDA Keuangan. Langkah-langkah analisis data pada penelitian ini adalah :

1. Data yang didapatkan melalui wawancara dibuat transkrip wawancaranya.
2. Transkrip wawancara yang diperoleh dari berbagai sumber kemudian di deskripsikan.
3. Data yang telah di deskripsikan di uji keabsahan datanya dengan membandingkan data dari berbagai sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, kajian teori dan metodologi penelitian yang telah diuraikan terdahulu, maka akan disajikan hasil penelitian melalui wawancara langsung dengan informan yang telah dipilih, informan tersebut adalah para pegawai/staf yang terkait langsung dengan proses akuntansi di Kantor Camat Pariaman Tengah, Kantor Camat Pariaman Timur, Kantor Camat Pariaman Utara dan Kantor Camat Pariaman Selatan. Hal ini untuk menjamin validitas informasi yang disampaikan.

Data wawancara, data dokumentasi dan data *observasi* langsung yang diperoleh, maka dilakukan organisasi data yaitu kategorisasi dan menyimpulkan berdasarkan pertanyaan penelitian. Selanjutnya dilakukan pemahaman untuk menemukan tema yang ada. Untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama yaitu “Bagaimana pemahaman pegawai tentang Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan pada Kantor Camat Pariaman Tengah, Kantor Camat Pariaman Timur, Kantor Camat Pariaman Selatan dan Kantor Camat Pariaman Utara”. Ditemukan tiga tema yaitu pengertian dari aplikasi SIMDA Keuangan, bagaimana prosedur pengelolaan keuangan dengan aplikasi SIMDA Keuangan, apakah aplikasi SIMDA Keuangan membantu dalam proses pengolahan keuangan dan kelebihan menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan. Hasil analisis data ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Analisis Data Untuk Pertanyaan Pertama

Tema yang ditemukan	Responden	Triangulasi	
		Informasi yang disampaikan	Sumber Data
Pengertian dari SIMDA Keuangan	Kasubag Keuangan Kec.Pariaman Tengah	Suatu program aplikasi komputer akuntansi yang dapat digunakan untuk pengelolaan keuangan daerah.	Wawancara
Proses pengelolaan keuangan dengan menggunakan aplikasi SIMDA	Kasubag Keuangan Kec.Pariaman Tengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk <i>database</i> anggaran kinerja. 2. Penginputan bukti penerimaan dan surat tanda setoran (STS). 3. Penerbitan SPD. 4. Mengelola laporan keuangan. 	Observasi
Aplikas SIMDA dapat membantu dalam proses pengelolaan keuangan dalam setiap prosedur	Kasubag Keuangan Kec.Pariaman Timur	<p>Mempermudah proses penyajian RKA, DPA dan SKPD dalam prosedur panganggaran pada aplikasi SIMDA keuangan.</p> <p>Mempermudah dalam proses penginputan bukti penerimaan dan surat tanda setoran dalam prosedur penatausahaan pada aplikasi SIMDA keuangan.</p> <p>Mempermudah pembuatan SPP, penerbitan SPM dan SP2D, pembuatan SPJ dan penerimaan dan penyetoran pajak pada aplikasi SIMDA keuangan.</p> <p>Mempermudah dalam penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.</p>	Wawancara
Kelebihan aplikasi SIMDA Keuangan	Kasubag Keuangan Kec.Pariaman Selatan	<p>Membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah (penganggaran, pelaksanaan, per-tanggungjawaban);</p> <p>Menyusun laporan keuangan lebih efisien dan akurat;</p> <p>Menyimpan data keuangan untuk keperluan manajemen lainnya;</p> <p>Menyajikan informasi yang akurat secara efektif dan efisien yang akan digunakan oleh pengguna laporan;</p> <p>Mempermudah proses audit bagi Auditor dengan merubah tata cara audit manual menjadi <i>Electronic Data Processing (EDP) audit</i>.</p>	Wawancara

Untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kedua "Apa-apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan", Hasil analisis data ditunjukkan dalam tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Analisis Data Untuk Pertanyaan Kedua

Tema yang ditemukan	Responden	Triangulasi	
		Informasi yang disampaikan	Sumber Data
Kendala dalam penerapan SIMDA keuangan	Kasubag Keuangan Kecamatan Pariaman Tengah, Kecamatan Pariaman Timur, Kecamatan Pariaman Selatan dan Kecamatan Pariaman Utara	Belum ada dokumentasi mengenai bagan arus ringkasan (<i>summary flow chart</i>) yang memperlihatkan aliran/ arus kas data. Lemahnya <i>data management system</i> . Prosedur untuk melihat data secara <i>incidental</i> masih terlalu lama. Tata ruang perkatoran masih kurang memadai.	Wawancara

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil analisis terhadap kondisi yang dijumpai dalam penelitian seperti yang dibahas dalam bab sebelumnya maka kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara umum pegawai di Kantor Kecamatan Pariaman Tengah, Kantor Camat Pariaman Timur, Kantor Camat Pariaman Selatan dan di Kantor Camat Pariaman Utara sudah memahami makna dari Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan secara umum, yaitu sistem komputerisasi akuntansi yang diperuntukkan untuk pemerintah daerah untuk menglola laporan keuangan pemerintah daerah. Pegawai Kantor Camat Pariaman Tengah, Kantor Camat Pariaman Timur, Kantor Camat Pariaman Utara dan Kantor Camat Pariaman Selatan juga sudah bisa mengoprasikan aplikasi SIMDA Keuangan dengan benar

sehingga mereka dapat menyelesaikan laporan keuangan dan SPJ secara tepat waktu.

2. Kendala yang dihadapi dalam penerapan SIMDA Keuangan yaitu: Belum ada dokumentasi mengenai bagan arus rigkasan (*summary flow chart*) yang memperlihatkan aliran kas data, Lemahnya *data management system*, Prosedur untuk melihat data secara *incidental* masih terlalu lama, Tata ruang perkantoran masih kurang memadai, Seringnya *human erorr*, Seringnya aplikasi SIMDA Keuangan *expired*, dan Seringnya jaringan *offline*.

DAFTAR PUSTAKA

Darea, D.W., & Elim, I. (2015). Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan pada DPPKA Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(2).

- Grizzle, G.A., & Pettijohn, C.D. (2002). Implementing Performance-Based Program Budgeting: A System-Dynamics Perspective. *Public Administration Review*, 62(1): 51-62.
- Iskandar. (2009). *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: GP Press.
- Kumorotomo. (2004). *Sistem Informasi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Mcleod, R. (2010). *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Moleong, J. Lexy. (2010): *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- O'Brien, J.A., & Marakas, G.M. (2005). *Introduction to Information Systems*. New York City, USA: McGraw-Hill/Irwin.
- Sidharta, L. (1995). *Pengantar Sistem Informasi Bisnis*. Jakarta: Elek Media Komputindo.
- Sugiyono. (2014). *Uji Keabsahan Data dalam Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sutabri, T. (2012). *Analisis Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi.
- Sutanta, E. (2003). *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wahab, A. Solichin. (2008). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UMM Press.